

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, K., 2020. *Hukum Perkawinan Dan perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Asman, 2020. *Perkawinan Dan Perjanjian Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. 1 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asman, 2022. *Kapita Selekta Hukum Keluarga*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Anand, G., 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris DI Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asnawi, M., 2022. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L. H. & Israfil, 2020. *Hukum Keluarga*. Pertama ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Chandranegara, I. S., 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.
- Hartanto, J. A., 2021. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan*. Ed 2 ed. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hasan, S., 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Ilsnaeni, M., 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Judiasih, S. D., 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Pertama ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moechthar, O., 2017. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Muchsin, H., Koeswahyono, I. & Soimin, 2019. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Keempat ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nugroho, B. D., 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Pertama ed. Bandung: PT Refika aditama.
- Salim, 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P., 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Kelima ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sembiring, R., 2017. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Sugiarto, U. S., 2016. Pengantar Hukum Indonesia. In: I. Tarmizi, ed. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 109.
- Syaifuddin, M., 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Thalib, A. R., 2018. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wihardjo, R. R., 2023. *Kedudukan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran*. 1 ed. Makassar: Nas Media Pustaka.

JURNAL/ARTIKEL

- Amalia, Y. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta Perkawinan yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

- Arliman, L., 2019. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendikia Hukum*, p. 290.
- Brata, D. L., Adnyani, N. K. S. & Sudiatmaka, K., 2018. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/015. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 1, pp. 220-223.
- Dantes, K. F., 2021. Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, p. 921.
- Darusman, Y. M., 2017. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Akta Otentik Dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Pascasarjana Universitas Pamulang*, p. 46.
- Dewi, N. N. M. P. S., 2018. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Universitas Udayana*, p. 2.
- Dinaryanti, A. R., 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, I(3), p. 2.
- Dwiputra, A. E. A., 2023. Perjanjian Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Journal Universitas Surabaya*, p. 82.
- Dwiputra, A. E. A., 2023. Perjanjian Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Journal Universitas Surabaya*, p. 82.
- Edlynafitri, R. S., 2015. Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*, Volume III, p. 113.

- Hadi, I. G. A. A., 2023. Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, p. 567.
- Ilvira, M. L., 2021. Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran. *Jurnal Lex Justitia*, III(2), pp. 3-6.
- Jati, I. W., 2023. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III(1), p. 21.
- Johansyah, 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding). *Jurnal Unpal*, p. 168.
- Kualaria, S., 2015. Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. p. 13.
- Maslul, S., 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian. *Jurnal Mahkamah*, 1(2), p. 421.
- Pakaya, S. G., 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, IV(2), p. 4.
- Pramasantya, O. S., 2017. Perjajian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum*, p. 195.
- Rahman, F., 2016. Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, XIII(13), p. 350.
- Ridhanti, A. V., 2023. Tinjauan Tentang Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, II(1), p. 224.

- Rohman, M. F., 2022. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume VII, pp. 21-22.
- Sasauw, C., 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, III(1), p. 100.
- Septianingsih, K. A., 2020. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, pp. 338-339.
- Septianingsih, K. A., 2020. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, pp. 338-339.
- Septiawan, A. A., 2017. Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, II(1), p. 64.
- Soeroso, F. L., 2014. Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, XI(1), p. 80.
- Sundah, P., 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. *Lex et societatis*, II(4), p. 36.
- Tjukup, I. K., 2016. Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, p. 181.
- Utami, R. T. M., 2021. Aspek Hukum Di Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2809), p. 18.
- Yaqin, K., 2023. Kedudukan Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Jurnal Hukum Wijaya Putra*, I(2), p. 85.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015